

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
- Ali, Zainal, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Chomzah, Ali Ahmad, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Dewi, Yetty Komalasari, 2011, *Pemikiran Baru Tentang Commanditaire Vennootschap (CV)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2008, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., 1995, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., dan Christine S.T. Kansil, 2010, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusuma, Sutanya Hadhi dan Sumantono, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia, CV*. Rajawali, Jakarta.
- Mahrus, Akhmad, ____, *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Kewenangan Pada Umumnya*, Kementerian Keuangan: Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2004, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan; Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Purwosutjipto, H. M. N., 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Djambatan, Jakarta.

- Ridho, Ali, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Santoso, Urip, 2007, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta.
- Soeharto, Bohar, 1989, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Inter Masa, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Widjaya, I.G Rai, 2007, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha*, Cetakan Ketujuh, Kesaint Blanc, Jakarta.
- _____, 2018, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha*, Badan Pembinaan Hukum Nasional: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 733).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011).

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 02/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*).

C. Jurnal/Tesis

Adhim, Nur, Siti Mahmudah, dan Komelius Benuf, "Telaah Yuridis Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Persekutuan Komanditer (CV)", *Jurnal Hukum*, Volume 36, Nomor 1, Juni, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.

Batubara, Sonia Carolline, Geradin M. J. Kotan, dan Rico Andrian Hartono, "Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan", *Jurnal Hukum (Jurnal of Notarial Law)*, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Volume 2, Nomor 3, Oktober, 2019.

- Hadisti, Faizah Inas, Widhi Handoko, dan Irawati, “Kebijakan Menteri ATR/BPN Terkait Dengan Hak Kepemilikan Atas Tanah Pada Perseroan Komanditer”, *Jurnal Notarius*, Volume 12, Nomor 2, Semarang: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 2019.
- Herawaty, Nevy, “Kerancuan Persekutuan Komanditer (CV) Sebagai Subyek Hak Guna Bangunan (HGB) dan Implikasinya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.
- Kurniawaty, Yuniar, “Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 1, Maret, Gorontalo: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 2016.
- Rudy, Dewa Gede, dan Cokorda Istri Bрами Putri Biya, “Persekutuan Komanditer Sebagai Subjek Pemegang Hak Guna Bangunan Berdasarkan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 1, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.
- Suratno, Sadhu Bagas, “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, *e-Journal Lentera Hukum*, Volume 4, Desember, 2017.

D. Internet

- Jurnal Hukum, “Hak Milik”, dalam <https://www.jurnalhukum.com/hak-milik/>, diakses pada tanggal 18 September 2020.
- Jurnal Hukum, “Syarat-Syarat Badan Hukum”, dalam <https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-badan-hukum/>, diakses pada tanggal 21 September 2020.
- Hukum Online, “Prosedur Permohonan Hak Pengelolaan Tanah Negara”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt580d7be6bfc8f/prosedur-permohonan-hak-pengelolaan-tanah-negara>, diakses pada tanggal 19 September 2020.
- Hukum Online, “Surat Edaran, ‘Kerikil’ Dalam Perundang-Undangan”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran-kerikil-dalam-perundang-undangan/>, diakses tanggal 25 September 2020.
- Hukum Online, “Surat Edaran Bukan Peraturan Perundang-Undangan”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18765/surat-edaran-bukan>

[-peraturan-perundangundangan?page=2,](#) diakses tanggal 26 September 2020.

Kementerian Keuangan; Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, “Kedudukan Aturan Kebijakan (Surat Edaran, Instruksi, Petunjuk Teknis) Dalam Hukum Positif di Indonesia”, dalam <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-kedudukan-at-uran-kebijakan-surat-edaran-instruksi-petunjuk-teknis-dalam-hukum-positif-di-indonesia--2019-11-05-64fb4d82/>, diakses tanggal 25 September 2020.